



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1332/DJA/TI1.1.1/VI/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 7 lampiran  
Hal : Monitoring Pelaksanaan Kebijakan  
Aplikasi Access CCTV Online  
(ACO)

20 Juni 2024

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh  
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2657/DJA/HM.02.3/5/2022 tanggal 20 Mei Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Nomor 3026/DJA.2/TI1.1.1/X/2023 tanggal 2 Oktober Tahun 2023 tentang Monev Standar Tata Letak dan Kejernihan Gambar CCTV, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan satuan kerja di bawahnya yang telah melaksanakan kebijakan pengawasan melalui Aplikasi Access CCTV Online (ACO) tersebut dan sudah mengkoneksikan CCTV-nya secara *online* ke dalam aplikasi dimaksud;
2. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Access CCTV (ACO) terhadap fungsi pengawasan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah memberikan akses aplikasi Access CCTV Online (ACO) kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Inspektur Wilayah II, Inspektur Wilayah III, dan Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sehubungan dengan itu diminta kepada seluruh pimpinan satuan kerja beserta seluruh pegawai di lingkungan peradilan agama agar senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dan disiplin;

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



3. Bahwa setelah dilakukan monitoring pada tanggal 14 Juni tahun 2024 masih ditemukan beberapa satker yang CCTV-nya tidak aktif sesuai lampiran I dan II;
4. Bahwa masih terdapat satuan kerja yang belum mengisi laporan Monitoring dan Evaluasi CCTV pada Aplikasi *Access CCTV Online (ACO)* bulan Mei 2024 sebagaimana pada lampiran III dan IV. Selanjutnya diminta kepada Hakim Tinggi yang telah ditugaskan untuk memonitoring dan mengisi laporannya secara *real time* pada aplikasi dengan menggunakan user masing-masing Hakim Tinggi;
5. Bahwa setelah dilakukan monitoring pada tanggal 14 Mei tahun 2024 Jumlah Pengunjung sesuai lampiran V;
6. Bahwa diminta kepada Ketua/Wakil Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh titik, mengisi laporan monitoring dan evaluasi pada Aplikasi A.C.O dan segera mengaktifkan Kembali CCTV yang offline;
7. Bahwa ada beberapa Pengadilan Tinggi Agama yang sewa *vps (virtual privat server)* nya telah habis. Diminta kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk segera melakukan penyewaan *vps* kembali agar operasional CCTV dapat segera berjalan.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**